**DAFTAR PUSTAKA**

Sumber Buku

Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009.*Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009*. Pengantar Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 89

Kansil, C.S.T S.H. (2002) *Modul Hukum Internasional*, Jakarta : IKAPI.

Maelong, Lexy (2001) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.

United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah,* Jakarta : UNDP

Musdah, Siti. *Perempuan dan Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. 2003. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Fakih, Mansour, 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar.

Prinst, Darwan. 2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Aditya Bakti. Bandung.

Yayasan Jurnal Perempuan, 2006. Sejauh Mana Komitmen Negara ? (Jurnal Perempuan), Nomor 45, Mei

 Mahfud, Moh. 2001. Dasar dan Stuktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta

 Nasution, S., 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito. Jakarta.

Sumber Internet

<http://www.beritasatu.com/nasional/300049-gerakan-indonesia-beragam-dukung-mendagri-hapus-139-perda-diskriminatif.html> di akses pada 20 april 2018

<http://www.tribunnews.com/tribunners/2017/04/25/kongres-ulama-perempuan-berkontribusi-mengisi-semangat-kebangsaan-yang-berkeadilan> di akses pada 20 april 2018

<http://www.softilmu.com/2014/08/pengertian-perjanjian-internasional.html>

di akses pada 20 april 2018

<http://merahnews.com/tag/menteri-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/> di akses pada 25 april 2018

<http://ilmu-hi.blogspot.co.id/2015/04/perspektif-liberalisme-dalam-teori.html> di akses pada tanggal 1 mei 2018

<https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perjanjian-Internasional.html>

di akses pada 1 mei 2018

<http://www.dpd.go.id/artikel-905-kaukus-perempuan-parlemen-ri--meneguhkan-komitmen-politik-perempuan-parlemen-bagi-keterwakilan-isu-perempuan-dan-anak> di akses pada 21 juni 2018

<https://www.theindonesianinstitute.com/mencermati-partisipasi-politik-perempuan/> di akses pada 21 juni 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/16/penerapan-30-persen-keterwakilan-perempuan-merupakan-strategi-pencapaian-kesetaraan-gender>

di akses pada 21 juni 2018

<https://www.komnasperempuan.go.id/reads-siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-komnas-perempuan-33-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia>

di akses pada 16 juli 2018

<https://www.antaranews.com/berita/425327/perempuan-indonesia-dan-politik>

di akses pada 16 juli 2018

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/24/partisipasi-perempuan-indonesia-di-kancah-politik-baru-17-persen> di akses pada 16 juli 2018

<https://natamihardja.wordpress.com/2007/10/03/penerapan-pasal-7-%E2%80%9Cconvention-on-the-elimination-of-all-forms-of-discrimination-against-women-1979%E2%80%9D-di-indonesia/> di akses pada 16 juli 2018

[file:///C:/Users/Window%207/Downloads/baru/factsheet-puskapol-curve.pdf](file:///C%3A/Users/Window%207/Downloads/baru/factsheet-puskapol-curve.pdf)

di akses pada 22 juli 2018

[file:///C:/Users/Window%207/Downloads/baru/factsheet-puskapol-curve.pdf](file:///C%3A/Users/Window%207/Downloads/baru/factsheet-puskapol-curve.pdf)

di akses pada 22 juli 2018

Undang – undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah